

ABSTRAK

KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Polresta Bandar Lampung)

**Oleh
Triana Carlos**

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap harkat dan martabat manusia dan merupakan kejahatan yang melanggar HAM. Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung, permasalahan perdagangan orang menjadi topik yang serius mengingat selama ini peran pelaku lah yang dititik-beratkan dalam persoalan perdagangan orang, sementara dalam praktiknya tidak jarang ditemukan permasalahan di mana posisi korban tidak sepenuhnya berada dalam posisi pasif, biasanya korban justru memiliki keterlibatan aktif dalam proses perekrutan. Oleh sebab itu, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama yaitu : Bagaimanakah kajian viktimologi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang? dan, Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan penyidik Polresta Bandar Lampung terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan hubungan antar teori dan praktik perlindungan terhadap korban TPPO yang ada pada di lapangan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan hasil analisa penelitian terdahulu dan peraturan perundang undangan yang sudah ada, serta metode pendekatan yuridis empiris dengan studi kasus di Polresta Bandar Lampung. Data yang diperoleh dihasilkan melalui wawancara terhadap narasumber yaitu penyidik di Unit PPA di Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Tenaga Ahli Biro Penelaahan Permohonan LPSK, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta hasil analisis hukum dan studi kepustakaan terkait viktimologi dan perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa pendekatan viktimologi menunjukkan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang tidak selalu dalam kondisi pasif, melainkan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu korban murni, korban semu, atau korban aktif. Viktimologi berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan memetakan posisi serta tingkat

Triana Carlos

kerentanan korban, berdasarkan faktor-faktor seperti ekonomi, sosial, pendidikan, serta tekanan dan manipulasi yang dialami korban, bukan untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, partisipasi korban dalam serangkaian tindak pidana tidak serta-merta menghapus kemungkinan pemidanaan apabila ditemukan unsur niat (*mens rea*) dan tindakan turut serta, namun teori viktimologi bisa menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menilai peran korban secara proporsional, termasuk dalam pemberian pengurangan hukuman. Selanjutnya, dalam memberikan perlindungan kepada korban, Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung menerapkan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) yang menekankan aspek keamanan, kenyamanan, dan pemulihan, dengan bekerja sama dengan LPSK, Dinas Sosial, serta lembaga masyarakat. Meskipun begitu, masih ada beberapa hambatan seperti kurangnya fasilitas rumah aman, minimnya tenaga pendamping profesional, serta belum cukup mendalamnya pemahaman tentang unsur niat jahat (*mens rea*) dalam membedakan antara korban dan pelaku, sehingga diperlukan keseimbangan antara melindungi korban dan menegakkan hukum secara tegas agar tercapai keadilan dan kepastian hukum tanpa menimbulkan reviktimisasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, saran dari penelitian ini agar pendekatan viktimologi digunakan dengan tepat sebagai cara untuk mengidentifikasi dan memetakan posisi serta tingkat kerentanan korban perdagangan orang, bukan sebagai alasan untuk menghilangkan tanggung jawab hukum. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan bisa memperhatikan teori viktimologi saat menilai latar belakang dan situasi korban serta pelaku secara adil, terutama dalam menentukan tingkat berat ringannya hukuman. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan tetap menunjukkan keadilan dan menjaga hak-hak manusia. Selain itu, Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung juga dianjurkan untuk meningkatkan kualitas proses penyidikan dengan lebih dalam menganalisis unsur niat jahat (*mens rea*) dan peran serta pelaku dalam setiap kasus TPPO, serta memberikan pelatihan khusus kepada penyidik agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan status hukum korban. Peningkatan kerja sama antar instansi, peningkatan sarana rumah aman, ketersediaan tenaga pendamping yang profesional, serta program pemulihan dan pemberdayaan ekonomi korban harus ditingkatkan agar perlindungan dan pemulihan korban dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya perdagangan orang kembali terjadi.

Kata Kunci : Viktimologi, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ABSTRACT

A VICTIMOLOGICAL STUDY OF VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING (Study at the Bandar Lampung Police Department)

**By
Triana Carlos**

The crime of human trafficking is a crime that has a serious impact on human dignity and is a crime that violates human rights. Bandar Lampung as the capital of Lampung Province, the problem of human trafficking has become a serious topic considering that so far the role of the perpetrator is the one that is emphasized in the problem of human trafficking, while in practice it is not uncommon to find problems where the position of the victim is not entirely in a passive position, usually the victim actually has active involvement in the recruitment process. Therefore, this study formulates two main problems, namely: How is the victimology study of victims of human trafficking? and, How is the legal protection provided by Bandar Lampung Police investigators to victims of human trafficking?

This study uses a qualitative research method by describing the relationship between theory and practice of protection for victims of human trafficking in the field. Using a normative juridical approach based on the results of previous research analysis and existing laws and regulations, as well as an empirical juridical approach method with a case study at the Bandar Lampung Police. The data obtained were generated through interviews with sources, namely investigators at the PPA Unit at the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit, Experts from the LPSK Application Review Bureau, and Criminal Law Academics at the Faculty of Law, University of Lampung, as well as the results of legal analysis and literature studies related to victimology and legal protection.

Based on the research results and discussion, it was concluded that the victimology approach shows that victims of human trafficking are not always in a passive state, but can be divided into three categories: pure victims, pseudo-victims, or active victims. Victimology serves as a tool to analyze and map the position and level of vulnerability of victims, based on factors such as economic, social, educational, as well as pressure and manipulation experienced

Triana Carlos

by the victim, not to determine whether or not there is criminal responsibility. Therefore, the victim's participation in a series of crimes does not necessarily eliminate the possibility of punishment if the elements of intent (mens rea) and acts of participation are found, but the theory of victimology can be a consideration for judges in assessing the victim's role proportionally, including in granting reduced sentences. Furthermore, in providing protection to victims, the Women and Children Protection Unit of the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit applies a victim-centered approach that emphasizes security, comfort, and recovery, in collaboration with the LPSK (Lembaga Witness and Victim Protection Agency), the Social Services Agency, and community organizations. However, several obstacles remain, such as a lack of safe house facilities, a lack of professional support staff, and an insufficient understanding of the element of malicious intent (mens rea) in distinguishing between victims and perpetrators. Therefore, a balance is needed between protecting victims and firmly enforcing the law to achieve justice and legal certainty without causing re-victimization.

Based on the research findings and discussion, this study recommends that the victimology approach be used appropriately as a means to identify and map the position and level of vulnerability of human trafficking victims, rather than as a justification for evading legal responsibility. Law enforcement officials, particularly judges, are expected to consider victimology theory when fairly assessing the background and circumstances of victims and perpetrators, particularly in determining the severity of punishment. This ensures that decisions rendered remain just and protect human rights. Furthermore, the Women and Children Protection Unit of the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit is encouraged to improve the quality of the investigation process by more deeply analyzing the elements of malicious intent (mens rea) and the perpetrator's role in each human trafficking case, as well as providing special training to investigators to prevent errors in determining the legal status of victims. Cooperation between agencies, the provision of safe houses, the availability of professional companions, and programs for victim recovery and economic empowerment must be enhanced to ensure effective protection and recovery for victims and prevent the recurrence of human trafficking.

Keywords : Victimology, Victim, Criminal Act of Human Trafficking.